GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PENJELASAN TERHADAP PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD PROVINSI SULAWESI TENGAH ATAS PIDATO RANCANGAN PERATURAN DAERAH (RAPERDA) TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

RABU, 2 JULI 2025

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ASSALAMU' ALAIKUM WAR, WAB,
SALAM SEJAHTERA UNTUK KITA SEKALIAN,
OM SWASTIASTU, NAMO BUDHAYA,
SALAM KEBAJIKAN!

YANG SAYA HORMATI:

- WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH,
- KETUA, PARA WAKIL KETUA DAN SELURUH ANGGOTA DPRD PROVINSI SULAWESI TENGAH
- SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH,
- STAF AHLI GUBERNUR, PARA ASISTEN, SERTA, PARA KEPALA OPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH,
- SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH, BESERTA JAJARANNYA,
- PARA TIM AHLI/TIM PAKAR DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
- PARA WARTAWAN BAIK MEDIA CETAK DAN ELEKTRONIK, SERTA HADIRIN DAN UNDANGAN YANG BERBAHAGIA,

P A N T U N

KE PASAR MASOMBA MEMBELI LADA,
SINGGAH SEBENTAR DI TOKO BAHAN.
RAPERDA KITA BAHAS BERSAMA,
WUJUD PERTANGGUNGJAWABAN, PENUH KEJUJURAN.

MENJARING IKAN DI PANTAI ENU,
HASILNYA BANYAK DIBAGI RATA.
SINERGI EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF SOLID BERSATU,
UNTUK SULAWESI TENGAH YANG MAJU DAN SEJAHTERA.

SEBAGAI UMAT BERAGAMA, PATUTLAH KITA MEMANJATKAN PUJI DAN SYUKUR KEHADIRAT ALLAH SWT, TUHAN YANG MAHA KUASA KARENA ATAS BERKAT RAHMAT DAN HIDAYAH-NYA, PADA HARI INI KITA DAPAT BERKESEMPATAN HADIR MENGIKUTI ***RAPAT PARIPURNA DPRD PROVINSI SULAWESI TENGAH DALAM RANGKA PENJELASAN TERHADAP PANDANGAN UMUM FRAKSI – FRAKSI DPRD PROVINSI SULAWESI TENGAH ATAS PIDATO PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024*** DIMANA FRAKSI–FRAKSI DPRD PROVINSI SULAWESI TENGAH TELAH MENYAMPAIKAN PANDANGAN UMUMNYA.

HADIRIN YANG SAYA HORMATI,

MENCERMATI TANGGAPAN/ PERTANYAAN DARI ANGGOTA DEWAN YANG TERHORMAT MELALUI PANDANGAN UMUM FRAKSI – FRAKSI, IZINKANLAH KAMI PADA KESEMPATAN INI MENYAMPAIKAN PENJELASAN SEBAGAI BERIKUT:

I. PANDANGAN UMUM FRAKSI GOLKAR

1. KAMI MENGUCAPKAN TERIMA KASIH DAN SANGAT MENGHARGAI APREASIASI SERTA TANGGAPAN DARI FRAKSI PARTAI GOLKAR YANG MENYATAKAN CAPAIAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH YANG TELAH MEMPEROLEH OPINI WTP YANG KE 12 (DUA BELAS) KALINYA MAUPUN CAPAIAN KINERJA LAINNYA PADA TAHUN 2024;
2. TERHADAP PERTANYAAN SEBAGAI BERIKUT :
    a. TERKAIT TIDAK TERCAPAINYA REALISASI PENDAPATAN DAERAH BAIK ITU PENDAPATAN ASLI DAERAH ATAU PAD, PENDAPATAN TRANSFER DAN LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH. DAPAT KAMI JELASKAN SEBAGAI BERIKUT :
        1. SECARA KUMULATIF REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH ATAU PAD TAHUN 2024 SEBESAR **93,94** PERSEN. JIKA CAPAIAN REALISASI PENDAPATAN TAHUN 2024 TERSEBUT DIBANDINGKAN DENGAN CAPAIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH ATAU PAD TAHUN 2023 MAKA SEBENARNYA TERJADI KENAIKAN SEBESAR **22,27** PERSEN. ADAPUN PADA TAHUN 2024 REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH ATAU PAD TERDIRI DARI PAJAK DAERAH TEREALISASI SEBESAR **108,91** PERSEN DARI TARGET YANG TELAH DITETAPKAN SERTA RETRIBUSI DAERAH TEREALISASI SEBESAR **114,51** PERSEN. TIDAK TERCAPAINYA TARGET PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH ATAU PAD SECARA KUMULATIF DISEBABKAN KARENA PENCAPAIAN REALISASI PADA PENDAPATAN HASIL

PENGELOLAAN KEKAYAN DAERAH YANG DIPISAHKAN HANYA TEREALISIR SEBESAR **24,16** PERSEN DAN LAIN LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH HANYA DIREALISASIKAN SEBESAR **68,66** PERSEN**.** PERMASALAHAN PADA DUA OBYEK PENERIMAAN TERSEBUT AKAN MENJADI PERHATIAN PEMERINTAH DAERAH PADA PERUBAHAN APBD TAHUN 2025 DAN APBD TAHUN 2026 UNTUK MERASIONALISASI TARGET PENERIMAAN YANG DITETAPKAN.

DAPAT DISAMPAIKAN PULA BAHWA KHUSUS UNTUK PENINGKATAN PAJAK AIR PERMUKAAN ATAU PAP SEBAGAIMANA YG DISAMPAIKAN FRAKSI PARTAI GOLKAR. PEMERINTAH DAERAH TELAH MELAKUKAN OPTIMALISASI DENGAN MEMBENTUK TIM OPTIMALISASI PAJAK AIR PERMUKAAN ATAU PAP YANG MELIBATKAN OPD TEKNIS DAN INSTANSI VERTIKAL YAKNI KEJAKSAAN TINGGI, BPKP, BALAI WILAYAH SUNGAI III SERTA MELAKUKAN REVISI REGULASI TERKAIT BESARAN NILAI PEROLEHAN AIR PERMUKAAN ATAU PAP DAN PENGADAAN ALAT UKUR (FLOWMETER) YANG DITEMPATKAN DI PERUSAHAAN PENGGUNA AIR PERMUKAAN.

OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH ATAU PAD JUGA DILAKUKAN PADA SEKTOR BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR DENGAN MELAKUKAN KERJA SAMA DENGAN BPH MIGAS DAN KPP PRATAMA TERKAIT PERTUKARAN DATA PENJUALAN BAHAN BAKAR MINYAK ATAU BBM DI

WILAYAH SULAWESI TENGAH, SERTA MEWAJIBKAN SEMUA PELAKU USAHA YANG MENJUAL BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR DI SULTENG WAJIB MEMILIKI SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG WAJIB PUNGUT (WAPU) PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR ATAU PBBKB SERTA MEMILIKI IZIN NIAGA UMUM ATAU INU YANG DIKELUARKAN OLEH DIREKTORAT JENDERAL MIGAS KEMENTERIAN ESDM.

2. UNTUK REALISASI PENDAPATAN TRANSFER TAHUN 2024 DICAPAI SEBESAR **91,09** PERSEN. TIDAK TERCAPAINYA TARGET PENERIMAAN TERSEBUT DISEBABKAN SEBAGAI BERIKUT :
   - PENERIMAAN DANA BAGI HASIL ATAU DBH DITRANSFER SEBESAR **73,86** PERSEN DISEBABKAN PEMERINTAH PUSAT MENYALURKAN DANA BAGI HASIL ATAU DBH KEPADA PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH DALAM BENTUK NON TUNAI. PENYALURAN DANA BAGI HASIL ATAU DBH NON TUNAI OLEH PEMERINTAH PUSAT MELALUI MEKANISME TREASURY DEPOSIT FACILITY (TDF) SESUAI DENGAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 44/KM.7/2024 TENTANG PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL DAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PADA TAHUN 2024
   - PENERIMAAN DANA ALOKASI UMUM ATAU DAU DITRANSFER SEBESAR **98,67** PERSEN.

DISEBABKAN PEMERINTAH PUSAT MENYALURKAN DANA ALOKASI UMUM ATAU DAU KEPADA PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TIDAK SESUAI DENGAN YANG DI TETAPKAN DALAM PERPRES N0MOR 76 TAHUN 2023 TENTANG RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2024. PERBEDAAN TERSEBUT DISEBABKAN ADANYA KURANG SALUR PENYALURAN DAU TRANSFER DANA ALOKASI UMUM DUKUNGAN PENGGAJIAN PPPK.

- PENERIMAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK ATAU DAK FISIK DAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK ATAU DAK NON FISIK DITRANSFER SEBESAR **97,34** PERSEN. DISEBABKAN EFISIENSI KARENA ADANYA SELISIH PAGU DENGAN KONTRAK PENGADAAN SERTA PEMOTONGAN PENYALURAN AKIBAT MASIH TERDAPAT SISA DANA YANG TIDAK TEREALISASIKAN PADA TAHUN SEBELUMNYA.

3. UNTUK REALISASI LAIN LAIN PENDAPATAN YANG SAH TAHUN 2024 DICAPAI SEBESAR **90,35** PERSEN. TIDAK TERCAPAINYA TARGET PENERIMAAN TERSEBUT DISEBABKAN KARENA REALISASI PENDAPATAN HIBAH BAIK DARI PEMERINTAH PUSAT DAN DARI BADAN/ LEMBAGA/ ORGANISASI DALAM NEGERI/ LUAR NEGERI BERSIFAT TIDAK WAJIB, TIDAK MENGIKAT DAN SUKARELA BAGI PENERIMA.

b. TERKAIT TIDAK TERCAPAINYA REALISASI BELANJA DAERAH BAIK ITU BELANJA OPERASI, BELANJA MODAL, BELANJA TIDAK TERDUGA DAN BELANJA TRANSFER. DAPAT KAMI JELASKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. UNTUK REALISASI BELANJA OPERASI TAHUN 2024 DICAPAI SEBESAR **89,16** PERSEN. TIDAK TERCAPAINYA TARGET BELANJA OPERASI DISEBABKAN KARENA BELANJA PEGAWAI HANYA DAPAT TEREALISASI SEBESAR **83,27** PERSEN DAN BELANJA BARANG DAN JASA TEREALISASI SEBESAR **83,27** PERSEN. ADAPUN BELANJA HIBAH DAPAT TEREALISASI SEBESAR **97,70** PERSEN DAN BELANJA BANTUAN SOSIAL TEREALISASI SEBESAR **99,18** PERSEN
2. UNTUK REALISASI BELANJA MODAL TAHUN 2024 DICAPAI SEBESAR **89,52** PERSEN. TIDAK TERCAPAINYA TARGET BELANJA MODAL DISEBABKAN KARENA TERDAPAT PAKET-PAKET PEKERJAAN MULTI YEARS CONTRACT ATAU MYC, PEKERJAAN FISIK YANG BELUM MENCAPAI TARGET, TIDAK TERLAKSANA-NYA PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA, AKUMULASI DARI SISA-SISA PENAWARAN PADA SAAT PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA.
3. UNTUK REALISASI BELANJA TIDAK TERDUGA TAHUN 2024 DICAPAI SEBESAR **2,73** PERSEN. TIDAK TERCAPAINYA TARGET BELANJA TIDAK TERDUGA DISEBABKAN KARENA KRITERIA UNTUK BELANJA TAK TERDUGA ADALAH KEGIATAN YANG

SIFATNYA TIDAK BIASA ATAU TIDAK DIHARAPKAN BERULANG, TERMASUK PENGEMBALIAN ATAS KELEBIHAN PENERIMAAN DAERAH TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA.

4. UNTUK REALISASI BELANJA TRANSFER TAHUN 2024 DICAPAI SEBESAR **99,01** PERSEN.

3. APRESIASI YANG SETINGGI-TINGGINYA ATAS BEBERAPA SARAN DAN MASUKANNYA TERUTAMA : MEMINTA PROVINSI SULAWESI TENGAH, UNTUK MELAKUKAN OPTIMALISASI PENDAPATAN KHUSUSNYA PADA PENDAPATAN PAJAK DAERAH.
4. HAL – HAL LAIN YANG BELUM JELAS AKAN DIBAHAS PADA PEMBAHASAN BERIKUTNYA.

SIDANG PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT,

II. PANDANGAN UMUM FRAKSI NASDEM

1. KAMI MENGUCAPKAN TERIMA KASIH DAN SANGAT MENGHARGAI APREASIASI SERTA TANGGAPAN DARI FRAKSI PARTAI NASDEM YANG MENGAPRESIASI BEBERAPA HAL YANG TERKAIT DENGAN KINERJA ATAS PELAKSANAAN APBD TAHUN 2024 DIANTARANYA KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DENGAN MEMPEROLEH OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN ATAU WTP
2. APRESIASI YANG SETINGGI-TINGGINYA ATAS BEBERAPA SARAN, MASUKAN DAN REKOMENDASI AGAR BENAR-BENAR MELAKUKAN EVALUASI DAN PERBAIKAN SERTA MENINGKATKAN PENGAWASAN TERHADAP KINERJA MASING-MASING OPD DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI ANTARANYA SEBAGAI BERIKUT :

a. UNTUK SEGERA MELAKUKAN TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN KELEMAHAN PENGANGGARAN PENDAPATAN ASLI DAERAH ATAU PAD, KELEMAHAN PEMUNGUTAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR ATAU PBBKB, KETIDAKSESUAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN ATAS 21 PAKET PEKERJAAN BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN YANG MENGAKIBATKAN KELEBIHAN PEMBAYARAN, DAN PENGELOLAAN ATAS PEMBAGIAN DANA CSR PT BPD SULTENG YANG BELUM MEMADAI ;
b. MENDORONG PEMERINTAH PROVINSI UNTUK SEMAKIN INOVATIF DALAM MENGGALI SUMBER SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH ATAU PAD DENGAN MELAKUKAN KAJIAN KAJIAN TENTANG POTENSI DAN PELUANG PENAMBAHAN PENDAPATAN DARI BERBAGAI SEKTOR TERUTAMA TERKAIT PELUANG INVESTASI DALAM SKALA BESAR, SERTA MELAKUKAN INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI ATAS KEGIATAN PEMUNGUTAN SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH ATAU PAD SEPERTI PAJAK AIR PERMUKAAN ATAU PAP, PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR ATAU PBBKB, PAJAK KENDARAAN DARI LUAR DAERAH YANG BEROPERASI DI WILAYAH SULAWESI TENGAH, RETRIBUSI DAERAH TERUTAMA DARI ASET DAERAH YANG BISA DIKERJASAMAKAN DENGAN PIHAK KETIGA DAN OPTIMALISASI SUMBER PAD LAINNYA,
c. MEMINTA KEPADA PEMERINTAH PROVINSI UNTUK DAPAT MEMPERBAIKI SISTEM PENERIMAAN

RETRIBUSI, JUGA ASUMSI TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI;

d. MEMBERI PRIORITAS ALOKASI BELANJA SEKTOR PENDIDIKAN, KESEHATAN, PERLINDUNGAN SOSIAL, INFRASTRUKTUR, PERTANIAN, PERKEBUNAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN DAN PROGRAM PENDUKUNG LAINNYA YAKNI :
   1) PADA BIDANG PENDIDIKAN YAKNI KETERSEDIAAN TEMPAT BELAJAR YANG MEMADAI BAGI SISWA, AGAR PERLU SEGERA DILAKUKAN PERBAIKAN RUANG-RUANG KELAS DAN PERPUSTAKAAN YANG RUSAK BERAT;
   2) PADA BIDANG KESEHATAN, AGAR PELAYANAN DAN SARANA PRASARANA DI RSUD UNDATA DAN RSUD MADANI PERLU DITINGKATKAN;
   3) PADA SEKTOR INFRASTRUKTUR MEMINTA PERHATIAN PADA SEJUMLAH JALAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI YANG SAAT INI KONDISINYA KURANG BAIK DI BEBERAPA KABUPATEN DI SULAWESI TENGAH. JUGA BEBERAPA RUAS JALAN YANG PERLU SEGERA DIBANGUN ATAU DI PERBAIKI ANTARA LAIN RUAS JALAN NAPU-SANGGINORA, RUAS JALAN TONUSU-PENDOLO, RUAS JALAN GINTU-GIMPU DAN RUAS JALAN BALINGARA-DATARAN BULAN;
   4) PADA SEKTOR IRIGASI YAKNI PEMBANGUNAN DAERAH IRIGASI PUNA KIRI YANG MENGAIRI SAWAH SELUAS +1700 HA AGAR SEGERA DIBANGUN DAN ANGGARANNYA TELAH DISETUJUI DI TAHUN ANGGARAN 2025, KARENA BENDUNG SUNGAI MAO

SEBAGAI SUPLESI DAERAH IRIGASI PUNA KIRI HANYA MAMPU MENGAIRI 1.200 HA AREA PERSAWAHAN, HAL INI BERARTI ADA 500 HA AREA PERSAWAHAN YANG BELUM TER-AIRI;

5) PADA SEKTOR PERTANIAN, PERKEBUNAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN YAKNI MENDORONG PEMBANGUNAN JALAN KANTONG PRODUKSI DAN JALAN USAHA TANI, BANTUAN ALAT MESIN PERTANIAN, PUPUK DAN BIBIT TANAMAN, ALAT TANGKAP NELAYAN, PERALATAN BUDIDAYA IKAN DAN BIBIT IKAN, SERTA BANTUAN TERNAK, UNTUK MEMPERKUAT KEMANDIRIAN PANGAN DI SULAWESI TENGAH;
6) PADA SEKTOR PERLINDUNGAN SOSIAL, YAKNI MENGHARAPKAN PROGRAM-PROGRAM PEMERINTAH YANG DAERAH MEMBERIKAN PERLINDUNGAN DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KHUSUSNYA KELOMPOK MISKIN DAN RENTAN;
7) MEMINTA KEPADA PEMERINTAH PROVINSI UNTUK DAPAT MEMBERIKAN PERHATIAN PADA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DALAM HAL BERUSAHA KARENA MASIH TERDAPAT HAMBATAN DI KABUPATEN/ KOTA DALAM HAL BERINVESTASI, CONTOH DI KOTA UNTUK PENGURUSAN PBB SANGAT LAMA

3. HAL – HAL LAIN YANG BELUM JELAS AKAN DIBAHAS PADA PEMBAHASAN BERIKUTNYA.

SIDANG PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT,

III. PANDANGAN UMUM FRAKSI DEMOKRAT

1. PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH MENGUCAPKAN TERIMA KASIH DAN SANGAT MENGHARGAI APREASIASI SERTA TANGGAPAN DARI FRAKSI DEMOKRAT YANG MENYATAKAN CAPAIAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH ATAS PELAKSANAAN APBD TAHUN 2024;
2. APRESIASI YANG SETINGGI-TINGGINYA ATAS BEBERAPA SARAN DAN MASUKANNYA DIANTARANYA YAKNI :
    a. MENDORONG AGAR BELANJA DAERAH DAPAT LEBIH DIARAHKAN PADA PROGRAM-PROGRAM PRIORITAS YANG BERSENTUHAN LANGSUNG DENGAN KEBUTUHAN DASAR MASYARAKAT, SEPERTI PENDIDIKAN, KESEHATAN, DAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN;
    b. MENGINGATKAN AGAR PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN (SILPA) DILAKUKAN SECARA BIJAK DAN TERENCANA;
    c. MEMPERKUAT TATA KELOLA KEUANGAN, PENGAWASAN INTERNAL, DAN TRANSPARANSI DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN;
    d. MENDORONG PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TAHUN-TAHUN MENDATANG LEBIH TERINTEGRASI, PARTISIPATIF, DAN BERBASIS DATA. HAL INI UNTUK MEMASTIKAN BAHWA PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DIRANCANG BENAR-BENAR MENJAWAB PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DI DAERAH.
3. HAL – HAL LAIN YANG BELUM JELAS AKAN DIBAHAS PADA PEMBAHASAN BERIKUTNYA.

IV. PANDANGAN UMUM FRAKSI GERINDRA

1. PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH MENGUCAPKAN TERIMA KASIH DAN SANGAT MENGHARGAI APREASIASI SERTA TANGGAPAN DARI FRAKSI GERINDRA YANG MENYATAKAN CAPAIAN KINERJA ATAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH YANG MAMPU MELANJUTKAN DAN MEMPERTAHANKAN OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN ATAU WTP YANG KE 12 (DUA BELAS) KALINYA;
2. APRESIASI YANG SETINGGI-TINGGINYA ATAS BEBERAPA SARAN, MASUKAN DAN REKOMENDASI AGAR BENAR-BENAR MELAKUKAN EVALUASI DAN PERBAIKAN SERTA MENINGKATKAN PENGAWASAN TERHADAP KINERJA MASING-MASING OPD DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DIANTARANYA SEBAGAI BERIKUT:
    a. PENGUATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH ATAU PAD AGAR TERUS DILAKUKAN MELALUI INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK DAERAH, PENINGKATAN KAPASITAS BADAN PENDAPATAN DAERAH DAN DIGITALISASI SISTEM PEMUNGUTAN DAN PELAYANAN PAJAK;
    b. MENDORONG PEMERINTAH DAERAH UNTUK MEMPERLUAS BASIS PENERIMAAN DAERAH SECARA MANDIRI;
    c. MEMASTIKAN VALIDITAS PERENCANAAN ANGGARAN DARI AWAL, SEHINGGA DAPAT MENYESUAIKAN ANTARA TARGET DAN POTENSI RIIL;
    d. MENDORONG AGAR ANGGARAN YANG DIGUNAKAN BETUL-BETUL MENYENTUH PRIORITAS PEMBANGUNAN, SEPERTI: PENDIDIKAN

BERKUALITAS DAN MERATA, LAYANAN KESEHATAN PRIMER DAN RUJUKAN DAN INFRASTRUKTUR DASAR YANG MEMADAI, TERMASUK DI WILAYAH TERPENCIL;

e. PERLU ADANYA ANALISIS MENYELURUH TERHADAP HAMBATAN PELAKSANAAN ANGGARAN AGAR PADA TAHUN BERIKUTNYA TIDAK TERJADI PENUMPUKAN SISA DANA
f. SILPA TAHUN BERJALAN HARUS DIRENCANAKAN DENGAN BAIK AGAR TIDAK MENJADI ANGKA SEMU, TETAPI BETUL-BETUL MENOPANG PEMBIAYAAN TAHUN 2025;
g. OPTIMALISASI PEMANFAATAN ASET TETAP DAERAH, SEPERTI TANAH DAN BANGUNAN, AGAR BISA MENGHASILKAN PENDAPATAN;
h. INVENTARISASI DAN PENILAIAN ULANG SELURUH ASET AGAR TIDAK TERJADI ASET TIDUR ATAU TIDAK TERMANFAATKAN;
i. FOKUS PENGANGGARAN HARUS DIARAHKAN UNTUK MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH, PENGURANGAN KEMISKINAN, DAN PENINGKATAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM);
j. PENGUATAN FUNGSI PENGAWASAN INTERNAL, KHUSUSNYA INSPEKTORAT, UNTUK MENDETEKSI LEBIH DINI POTENSI PENYIMPANGAN;
k. MENDORONG PELIBATAN MASYARAKAT SIPIL DAN TRANSPARANSI PUBLIK DALAM PEMANTAUAN PELAKSANAAN APBD

3. HAL – HAL LAIN YANG BELUM JELAS AKAN DIBAHAS PADA PEMBAHASAN BERIKUTNYA.

SIDANG PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT,

V. PANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

1. PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH MENGUCAPKAN TERIMA KASIH DAN SANGAT MENGHARGAI APREASIASI SERTA TANGGAPAN DARI FRAKSI PDI PERJUANGAN YANG MENYATAKAN CAPAIAN KINERJA ATAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SELAMA 12 (DUA BELAS) KALINYA DAPAT DI PERTAHANKAN DAN MENDAPATKAN PREDIKAT OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN ATAU WTP;
2. BEBERAPA REKOMENDASI HASIL AUDIT BPK-RI YANG MENJADI TEMUAN, SETUJU UNTUK SEGERA DI TINDAKLANJUTI DAN GUBERNUR BERTINDAK TEGAS DAN KONSISTEN TERHADAP KINERJA OPD DENGAN MEMBERIKAN ***PUNISHMENT*** BAGI OPD YANG LALAI SERTA MEMBERIKAN ***REWARD*** BAGI OPD YANG BERPRESTASI, DAN UNTUK PENEMPATAN PEJABAT-PEJABAT OPD AGAR SESUAI DENGAN KEMAMPUAN, PENGALAMAN DAN ETOS KERJA UNTUK MENCIPTAKAN BIROKRASI YANG BAIK DALAM MENJALANKAN RODA PEMERINTAHAN.
3. TERKAIT PENINGKATAN ANGGARAN APBD TETAPI BELUM MENUNJUKKAN PENURUNAN ANGKA KEMISKINAN DAERAH DI SUAWESI TENGAH. SEKALI LAGI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SETUJU UNTUK BERSAMA SAMA BERSIKAP PRO AKTIF DAN BEKERJASAMA SERTA MENGAWAL PENCAPAIAN INDIKATOR TERSEBUT.

4. TERKAIT DENGAN PROGRES TERHADAP TINDAK LANJUT DAN REKOMENDASI ATAS LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI DAPAT KAMI JELASKAN BAHWASANYA PROGRES TINDAK LANJUT UNTUK SEMESTER I (SATU) TAHUN 2025 TELAH SELESAI DI LAKSANAKAN PADA TANGGAL 23 JUNI 2025 SAMPAI DENGAN 25 JUNI 2025 DI AUDITORIUM BPK RI PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI TENGAH. BERDASARKAN DATA, JUMLAH TEMUAN SEBESAR 587 (*LIMA RATUS DELAPAN PULUH TUJUH)* TEMUAN DAN 1.556 *(SERIBU LIMA RATUS LIMA PULUH ENAM)* REKOMENDASI MULAI DARI TAHUN 2005 SAMPAI DENGAN 2025. JUMLAH REKOMENDASI YANG SUDAH DITINDAKLANJUTI DAN SUDAH SESUAI SEJUMLAH 1.142 *(SERIBU SERATUS EMPAT PULUH DUA)*. JUMLAH REKOMENDASI YANG SUDAH DITINDAKLANJUTI DAN BELUM SESUAI SEJUMLAH 336 (*TIGA RATUS TIGA PULUH ENAM)*. JUMLAH REKOMENDASI YANG BELUM DITINDAKLANJUTI SEJUMLAH 57 *(LIMA PULUH TUJUH)*. JUMLAH REKOMENDASI YANG TIDAK DAPAT DITINDAKLANJUTI DENGAN ALASAN YANG SAH SEJUMLAH 21 *(DUA PULUH SATU)*.
5. TERKAIT DENGAN PERTANYAAN BAHWA TERJADI PENINGKATAN ANGGARAN APBD TETAPI BELUM MENUNJUKKAN PENURUNAN TERHADAP ANGKA KEMISKINAN DAERAH, TINDAKLANJUT YANG AKAN DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SADALAH AKAN MEMASTIKAN ALOKASI BELANJA KEMISKINAN LEBIH TEPAT SASARAN DENGAN STRATEGI PENDEKATAN PENGURANGAN BEBAN,

PENINGKATAN PENDAPATAN DAN AKAN MENGURANGI KANTONG KEMISKINAN SEHINGGA APBD AKAN LEBIH FOKUS PADA BELANJA LANGSUNG KEPADA MASYARAKAT MISKIN.

6. HAL – HAL LAIN YANG BELUM JELAS AKAN DIBAHAS PADA PEMBAHASAN BERIKUTNYA.

VI. PANDANGAN FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

1. PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH MENGUCAPKAN TERIMA KASIH DAN SANGAT MENGHARGAI APREASIASI SERTA TANGGAPAN DARI FRAKSI KEADILAN SEJAHTERA ATAS CAPAIAN OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN ATAU WTP YANG KE 12 (DUA) KALINYA;
2. BEBERAPA CATATAN YANG DISAMPAIKAN OLEH FRAKSI KEADILAN SEJAHTERA UNTUK MENJADI PERHATIAN. TERKAIT DENGAN HAL TERSEBUT PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SETUJU UNTUK SEGERA MENINDAKLANJUTI DIMASA AKAN DATANG DI ANTARANYA ADALAH:
    a. TARGET PENDAPATAN ASLI DAERAH ATAU PAD MASIH SANGAT POTENSIAL UNTUK DITINGKATKAN DENGAN MENGOPTIMALKAN PENGELOLAAN DAN PENETAPAN BEBERAPA POS RETRIBUSI SERTA PAJAK KENDARAAN. KHUSUSNYA BAGI KENDARAAN-KENDARAAN YANG ADA DI PERUSAHAAN TAMBANG YANG ADA DI SELURUH SULAWESI TENGAH, DIMANA SAAT INI MASIH MENGGUNAKAN NOMOR POLISI LUAR SULAWESI TENGAH, SEHINGGA OTOMATIS PEMBAYARAN

PAJAKNYA TIDAK DILAKUKAN DI SULAWESI TENGAH;

b. TERKAIT PERJUANGAN DAN REALISASI UNTUK MENDAPATKAN DANA BAGI HASIL ATAU DBH SEKTOR PERTAMBANGAN DARI PEMERINTAH PUSAT DAPAT KAMI JELASKAN SAAT INI PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH MELALUI BAPAK GUBERNUR BERUPAYA UNTUK MENDAPATKAN DANA BAGI HASIL ATAU DBH HASIL PERTAMBANGAN DARI PUSAT YAITU TERHADAP KURANG BAYAR TAHUN 2023 SESUAI KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 44 TAHUN 2024 YANG BELUM DISALURKAN KE PEMERINTAH PROVINSI, DAN TELAH DIKONSULTASIKAN DI KEMENTERIAN KEUANGAN RI NAMUN BELUM MENDAPATKAN PETUNJUK PERINTAH BAYAR MELALUI KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN;

c. DAMPAK DARI PERANG DI KAWASAN TIMUR TENGAH, GUBERNUR SULAWESI TENGAH, BERSAMA TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH ATAU TAPD, SUDAH HARUS MEMBUAT KALKULASI DALAM RANGKA MENGANTISIPASI BERGEJOLAKNYA EKONOMI GLOBAL DAN NASIONAL, KARENA HAL INI BISA MENJADI ANCAMAN PALING NYATA, DIMANA PREDIKSI NAIKNYA HARGA GAS DAN MINYAK MENTAH AKAN IKUT MEMBERIKAN PENGARUH TERHADAP BAHAN BAKAR MINYAK ATAU BBM. JIKA HAL INI BENAR-BENAR TERJADI, MAKA SUDAH TENTU TERJADI INFLASI BESAR-BESARAN.

3. HAL – HAL LAIN YANG BELUM JELAS AKAN DIBAHAS PADA PEMBAHASAN BERIKUTNYA.

SIDANG PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT,

VII. PANDANGAN UMUM PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

1. KAMI MENGUCAPKAN TERIMA KASIH DAN SANGAT MENGHARGAI APREASIASI SERTA TANGGAPAN DARI FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA ATAS CAPAIAN KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, YANG TELAH MENDAPATKAN OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN ATAU WTP ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH ATAU LKPD TAHUN 2024. PEMERINTAH DAERAH MENYADARI BAHWA CAPAIAN TERSEBUT TIDAK AKAN MEMBUAT PEMERINTAH DAERAH BERPUAS DIRI, AKAN TETAPI PEMERINTAH DAERAH MAKIN DITUNTUT UNTUK LEBIH MEMACU SELURUH POTENSI KREATIF DI MASA YANG AKAN DATANG;
2. APRESIASI YANG SETINGGI-TINGGINYA ATAS BEBERAPA SARAN DAN MASUKANNYA DAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SETUJU UNTUK MENINDAKLANJUTI DIMASA AKAN DATANG, TERUTAMA PADA HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT:
   a. MENDORONG PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH AGAR CAPAIAN PELAKSANAAN APBD DI TAHUN TAHUN BERIKUTNYA MASIH PERLU DITINGKATKAN, BAIK DARI SISI SERAPAN ANGGARAN, EFEKTIVITAS PROGRAM, MAUPUN PEMERATAAN PEMBANGUNAN ANTARWILAYAH;
   b. MENDORONG PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS

PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM AGAR TARGET PEMBANGUNAN DAPAT TERCAPAI SECARA MAKSIMAL;

c. MENDORONG PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH MENEKANKAN PENTINGNYA PENINGKATAN PROPORSI BELANJA PRODUKTIF, TERUTAMA UNTUK SEKTOR INFRASTRUKTUR, PENDIDIKAN, KESEHATAN, SERTA PEMBERDAYAAN EKONOMI RAKYAT, KHUSUSNYA BAGI PELAKU UMKM DAN PETANI DI DAERAH;

d. MENDORONG PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH AGAR DISTRIBUSI PROGRAM DAN ANGGARAN LEBIH MERATA, TERUTAMA KE WILAYAH PESISIR, PEGUNUNGAN, DAN DAERAH TERTINGGAL LAINNYA YANG SELAMA INI KURANG TERJANGKAU;

e. MENGINGATKAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH BAHWA PERTANGGUNGJAWABAN APBD TIDAK HANYA FOKUS PADA SERAPAN ANGGARAN, MELAINKAN HARUS BERDAMPAK LANGSUNG TERHADAP PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN PUBLIK YANG DIRASAKAN OLEH MASYARAKAT;

f. MENGINGATKAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH AKAN PENTINGNYA PENGUATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL ATAU SPI GUNA MENCEGAH PENYIMPANGAN ANGGARAN SEJAK DINI, SERTA MENDORONG TRANSPARANSI DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP PERTANYAAN TENTANG :

   a. BESARAN SILPA YANG MASIH TERGOLONG TINGGI. DAPAT KAMI JELASKAN BAHWASANYA SISA LEBIH

PEMBIAYAAN ANGGARAN ATAU SILPA TAHUN 2024 SEBESAR ***RP128.516.426.885,29 (128 MILYAR, 516 JUTA, 426 RIBU, 885 RUPIAH, 29 SEN)*** JIKA DI BANDINGKAN DENGAN SILPA TAHUN 2023 SEBESAR ***RP290.945.332.497,33 (290 MILYAR, 945 JUTA, 332 RIBU, 497 RUPIAH, 33 SEN)*** MENGALAMI PENURUNAN SEBESAR ***RP162.428.905.612,04 (162 MILYAR, 428 JUTA, 905 RIBU, 612 RUPIAH, 4 SEN)*** ATAU 55,83 PERSEN.

3. HAL – HAL LAIN YANG BELUM JELAS AKAN DIBAHAS PADA PEMBAHASAN BERIKUTNYA.

VIII. PANDANGAN UMUM FRAKSI AMANAT PERSATUAN PEMBANGUNAN RAKYAT (AMPPERA).

1. PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH, MENGUCAPKAN TERIMA KASIH DAN SANGAT MENGHARGAI TANGGAPAN DARI FRAKSI AMANAT PERSATUAN PEMBANGUNAN RAKYAT ATAS APREASIASI YANG TINGGI DIMANA LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH ATAU LKPD TELAH MEMENUHI BEBERAPA KRITERIA UTAMA, YAITU KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH, DAN PENGUNGKAPAN YANG MEMADAI ATAS LAPORAN KEUANGAN DENGAN JELAS SEHINGGA PENGGUNA LAPORAN DAPAT MEMAHAMI KONDISI KEUANGAN DAERAH;
2. APRESIASI YANG SETINGGI-TINGGINYA ATAS BEBERAPA SARAN DAN MASUKANNYA, UNTUK ITU PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SETUJU

UNTUK MENINDAKLANJUTI, TERUTAMA HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT :

a. TERKAIT LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI TAHUN 2024 YANG MENGALAMI PERLAMBATAN, MEMINTA KEPADA PROVINSI SULAWESI TENGAH UNTUK MELAKUKAN BEBERAPA STRATEGI KUNCI YANG DAPAT DITERAPKAN, YAITU ; MELAKUKAN INVESTASI DALAM INFRASTUKTUR, PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, DIVERSIFIKASI EKONOMI, SERTA MENDORONG INVESTASI ASING DAN INVESTASI DALAM NEGERI. SELAIN ITU PEMERINTAH DAERAH JUGA PENTING UNTUK MENDUKUNG SEKTOR USAHA KECIL MIKRO, KECIL DAN MENENGAH , DAN JUGA LEBIH FOKUS PADA PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN DAN HILIRISASI, YAITU HILIRISASI INDUSTRI NIKEL DAN HILIRISASI INDUSTRI BERBASIS PANGAN MENJADI KEMUTLAKAN UNTUK DIPRIORITASKAN DI MASA YANG AKAN DATANG;
b. TERKAIT TINGKAT KEMISKINAN DI PROVINSI SULAWESI TENGAH, MEMINTA KEPADA PEMERINTAH DAERAH KIRANYA DENGAN CAPAIAN OPINI WTP INI AKAN MEMBERIKAN DAMPAK TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT, DAN MENJADI STARTING POIN UNTUK MENYEMANGATI KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PADA TAHUN 2025;
c. TERKAIT CAPAIAN IPM PROVINSI SULAWESI TENGAH, MEMINTA KEPADA PEMERINTAH DAERAH UNTUK BERKOLABORASI DAN BERSINERGITAS

TERKAIT KEBIJAKAN PROGRAM PENINGKATAN DAYA SAING.

d. TERKAIT PENDAPATAN ASLI DAERAH ATAU PAD, MEMINTA KEPADA PEMERINTAH DAERAH UNTUK LEBIH MEMAKSIMALKAN SELURUH POTENSI SUMBER DAYA YANG ADA DENGAN CARA :
   1. MENINGKATKAN TARGET PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SESUAI REALISASI HISTORIS;
   2. MELAKUKAN OPTIMALISASI SUMBER-SUMBER PAD SEPERTI PENERIMAAN PAJAK AIR PERMUKAANAN (PAP) DENGAN MELAKUKAN PEMASANGAN METERAN YANG BUKAN HANYA DIPASANG KEBEBERAPA PERUSAHAAN SAJA, AKAN TETAPI KEPADA SEMUA PENGGUNA AIR PERMUKAAN SEHINGGA DAPAT DIKETAHUI TENTANG AKURASI VOLUME PENGGUNAANNYA;
   3. LAIN-LAIN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN MELALUI OPTIMALISASI PT. PEMBANGUNAN SULTENG DAN HOLDING COMPANY-NYA MAUPUN KOMPONEN PAD LAINNYA SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH (HKPD);

e. MEMINTA KEPADA PEMERINTAH DAERAH SEGERA MELAKSANAKAN PERTISIPASI INTEREST (PI). PARTISIPASI INTEREST ADALAH SEBUAH ISTILAH UMUM YANG DITEMUKAN DALAM KONTEKS INDUSTRI MINYAK DAN GAS BUMI DI INDONESIA. HAL INI MERUJUK PADA HAK KEPEMILIKAN DAN PARTISIPASI MAKSIMAL 10 PERSEN YANG WAJIB

DITAWARKAN OLEH KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA (KKKS) KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) DI WILAYAH KERJA MINYAK DAN GAS BUMI;

f. MEMINTA KEPADA PEMERINTAH DAERAH UNTUK MELAKUKAN UPAYA YANG SERIUS DALAM HAL PENDATAAN ALAT BERAT YANG ADA DI SULAWESI TENGAH, BAIK ITU MENYANGKUT JUMLAHNYA MAUPUN SOAL PAJAKNYA APAKAH SUDAH DIBAYARKAN ATAU BELUM DIBAYARKAN SERTA APAKAH ALAT BERAT YANG ADA TERSEBUT PAJAKNYA DIBAYARKAN DI DAERAH ASAL ATAU DI DAERAH TEMPAT ALAT TERSEBUT BEROPERASI. JIKA PAJAK ALAT BERAT DIBAYARKAN DI DAERAH ASAL, MAKA PERLU SEGERA ADA UPAYA DARI PEMERINTAH DAERAH MEMBUAT KEBIJAKAN UNTUK MENGALIHKAN PEMBAYARAN PAJAKNYA KE DAERAH TEMPAT BEKERJA;

g. MASIH MINIMNYA PENDAPATAN ASLI DAERAH ATAU PAD DARI HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG HANYA MENCAPAI 24,16 PERSEN. MEMINTA PEMERINTAH DAERAH UNTUK MENDORONG USAHA-USAHA PRODUKTIF DAN ASET DAERAH YANG DIKELOLA OLEH PT. PEMBANGUNAN SULTENG DAPAT DIOPTIMALKAN UNTUK MENINGKATKAN PAD SEPERTI BUMD BERGERAK DI BIDANG ENERGI MISALNYA PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA HIDRO (PLTH) DAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKRO HIDRO (PLTMH) BERSUMBER DARI SUNGAI DAN AIR TERJUN;

h. PADA PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN APBD TAHUN 2024, MASIH TERDAPAT BANYAK PROGRAM YANG TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN PADA BEBERAPA OPD, SEPERTI BANTUAN HIBAH UNTUK MAHASISWA, BANTUAN ALAT PERTANIAN, BANTUAN BIBIT PERTANIAN, BANTUAN PUPUK DAN LAIN-LAINNYA HARUS MENJADI CATATAN AGAR KE DEPANNYA DAPAT DIKOORDINASIKAN DENGAN BAIK SEHINGGA PROGRAM-PROGRAM BERIKUTNYA TIDAK TERJADI KENDALA DALAM PENGUSULAN DAN PELAKSANAANNYA;
i. MEMINTA KEPADA PEMERINTAH DAERAH MEMPERCEPAT REFORMASI PENGELOLAAN BUMD DAN ASET DAERAH, MENINGKATKAN AKURASI PERENCANAAN BELANJA MODAL, MEMPERLUAS CAKUPAN PELAYANAN PUBLIK BERBASIS WILAYAH, SERTA MENINGKATKAN ANGGARAN DAN KOORDINASI LINTAS SEKTOR DALAM PENGUATAN EKONOMI LOKAL DAN PANGAN;
j. MEREKOMENDASIKAN ADANYA SINKRONISASI DOKUMEN PERENCANAAN PENGANGGARAN YANG MENGANDUNG TRANSFORMASI DARI PARADIGMA BERBASIS "**UANG MENGIKUTI FUNGSI, MENJADI UANG MENGIKUTI PROGRAM, PROGRAM MENGIKUTI HASIL"** YANG BERORIENTASI PADA *PUBLIC SERVICE DELIVERIES* DALAM MAKNA INKLUSIVITAS PERTUMBUHAN EKONOMI SULAWESI TENGAH SECARA TEMATIK DAN SPASIAL.
k. TERKAIT TINDAK LANJUT DAN REKOMENDASI ATAS LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI TELAH KAMI

SAMPAIKAN PADA PANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN.

3. HAL – HAL LAIN YANG BELUM JELAS AKAN DIBAHAS PADA PEMBAHASAN BERIKUTNYA.

PIMPINAN RAPAT DAN ANGGOTA DEWAN YANG TERHORMAT,

DEMIKIAN BEBERAPA PENJELASAN YANG DAPAT KAMI SAMPAIKAN KEPADA PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN YANG TERHORMAT KIRANYA PENJELASAN ATAS PERTANYAAN/ SARAN DAN TANGGAPAN PADA PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI TERHADAP PIDATO PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 DAPAT MEMENUHI HARAPAN KITA SEMUA.

ADAPUN HAL-HAL YANG LEBIH TEKNIS DAN MASIH MEMBUTUHKAN PENJELASAN, PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SETUJU UNTUK DIBAHAS LEBIH LANJUT PADA RAPAT-RAPAT SELANJUTNYA.

AKHIRNYA ATAS SARAN DAN TANGGAPAN DARI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN YANG TERHORMAT KAMI UCAPKAN TERIMA KASIH DAN PENGHARGAAN YANG SETINGGI–TINGGINYA.

SEMOGA ALLAH SWT, TUHAN YANG MAHA KUASA SENANTIASA MEMBERI RIDHO KEBERKAHAN DAN KELANCARAN ATAS BAKTI PENGABDIAN YANG KITA CURAHKAN KEPADA BANGSA DAN NEGARA.

SEKIAN DAN TERIMA KASIH,
WALLAHUL MUSTA'AN,
WASSALAMU' ALLAIKUM WAR, WAB,

OM SHANTI SHANTI SHANTI OM.

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

DR. H. ANWAR HAFID, M.SI